

DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh:

Rahmat Kurniadi¹, Rama Gita Suci², Annie Mustika Putri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Jl. KH. Ahmad Dahlan 88, Pekanbaru – Riau.

Email koresponden: rahmatkurniadi161@gmail.com¹

Sejarah Artikel: Diterima September 2022, Disetujui Oktober 2022, Dipublikasikan November 2022

ABSTRAK

Kecurangan merupakan tindakan tidak jujur yang dapat menyebabkan potensi kerugian nyata terhadap pemerintah, perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh pimpinan suatu instansi, baik secara individual ataupun secara bersama sama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah bekerja diatas 5 tahun. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 116 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 2.6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi, Pencegahan Kecurangan

ABSTRAK

Fraud is a dishonest act that can cause potential real harm to the government, company or company employees or other people, fraud that occurs in the government environment is still common and sometimes difficult to overcome. Fraud is usually not only committed by lower-level employees, but also by the leadership of an agency, either individually or collectively. This study aims to examine the effect of the internal control system, whistleblowing system, and organizational culture on fraud prevention. The sample in this study were civil servants (PNS) at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency who had worked for more than 5 years. This study uses primary data collected using a questionnaire. In this study a sample of 116 respondents were selected using purposive sampling. The analytical tool used is SPSS 2.6. The results of this study indicate that the Internal Control System, Whistleblowing System, and Organizational Culture have a significant effect on preventing fraud in the Pekanbaru City Regional Revenue Agency.

Keywords: Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Culture, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Kecurangan/*fraud* merupakan tindakan tidak jujur yang dapat menyebabkan potensi

kerugian nyata terhadap pemerintah, perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain tetapi tidak sebatas pada korupsi,

pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Kecurangan seperti ini biasanya dilakukan oleh karyawan atau oknum di dalam pemerintah, perusahaan atau organisasi (Nugroho, 2015).

Kecurangan/*fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintah masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh pimpinan suatu instansi, baik secara individual ataupun secara bersama sama. Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu instansi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut (Sigiro, 2019).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapenda juga merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar (Wardana, 2017). Hal tersebut dikarenakan banyaknya tindakan kecurangan yang terjadi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam (Amrizal, 2004) terdapat tiga jenis kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Salah satu kasus dugaan kecurangan terjadi pada Bapenda kota Pekanbaru terkait kasus upah pungut atau pencairan dana insentif

sebesar Rp 1,3 miliar yang dilakukan pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru bersama stafnya, akhirnya menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Temuan tersebut berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan BPK RI tertanggal 29 Juni 2020, ditemukan kertas kerja penghitungan dan bukti pertanggungjawaban realisasi insentif pajak daerah tahun 2019, terdapat kelebihan pembayaran insentif yang melebihi ketentuan sebanyak Rp. 1.791.945.609,00.

Beredarnya data soal upah pungut atau pencairan insentif bagi pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan stafnya itu, Dimana Kepala Bapenda Pekanbaru, memerintahkan para pejabatnya dan staf untuk menarik uang yang telah masuk ke rekening dengan jumlah besaran beragam. Informasi tersebut memastikan bahwa bukti itu, dapat di cek pada masing-masing rekening 28 pejabat dan stafnya. Selanjutnya, uang itu disetorkan para Kepala Bidang (Kabid) dan Sekretaris Bapenda, yang selanjutnya diberikan kepada kepala Bapenda Pekanbaru total Rp1,3 miliar. Kejaksaan Negeri Pekanbaru lewat seksi tindak pidana khusus (kasipidsus) sempat mengendus dugaan korupsi upah pungut tersebut pada pertengahan Januari 2020 hingga akhir April 2020 lalu.

Terakhir laporan hasil pemeriksaan BPK RI tanggal 29 Juni 2020, ditemukan bahwa berdasarkan kertas kerja perhitungan dan bukti pertanggungjawaban realisasi insentif pajak daerah pada tahun 2019 terdapat kelebihan pembayaran insentif yang melebihi ketentuan sebanyak Rp. 1.791.945.609,00. Dimana pada data yang beredar, disebutkan nama-nama pejabat Bapenda Kota Pekanbaru ada sebanyak 28. Atas temuan itu, BPK RI memerintahkan, agar mengembalikan kelebihan bayar tersebut selama 60 hari kerja pasca laporan hasil pemeriksaan BPK RI diterbitkan tertanggal 29 Juni 2020 (amanahnews.com,2020).

Dari permasalahan diatas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecurangan / *fraud* yaitu dengan cara mengendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. *Comitte of Sorsoring Organization of the Treadway Commision* (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil pada organisasi, yang didesain buat

menyediakan keyakinan berkaitan menggunakan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap aturan dan efektifitas serta efisiensi operasi. Suatu organisasi membangun sistem pengendalian internal buat mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan pengendalian internal oleh suatu organisasi pula dimaksudkan buat mencapai tujuan pengendalian. Selain itu menurut (Sujana, 2020) semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintah daerah maka segala bentuk tindakan kecurangan dapat diminimalkan begitupun sebaliknya.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan kecurangan yaitu dengan penerapan *whistleblowing system*. *Whistleblowing* adalah pelaporan apabila adanya perilaku yang tidak etis maupun tidak bermoral atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau karyawan dalam suatu organisasi, sehingga hal tersebut dapat merugikan organisasi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adanya *whistleblowing system* memberikan kesempatan bagi seorang *whistleblower* untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Dan adanya *whistleblowing system* menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan / *fraud* tanpa adanya kekhawatiran karena kerahasiaan data terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai kecurangan (Musmulyadi, 2020). Tujuan dilakukannya *whistleblowing* adalah untuk melaporkan atau mengungkap tindakan yang diduga dapat merugikan suatu organisasi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Selain *whistleblowing system* adanya budaya organisasi yang baik juga sangat berpengaruh dan sangat penting dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindakan kecurangan. Budaya organisasi yaitu norma-norma, nilai, atau kebiasaan yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi tersebut yang digunakan sebagai panduan setiap melakukan aktivitas baik untuk semua anggota organisasi maupun pihak lain. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan budaya organisasi melalui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Apabila budaya organisasi baik maka akan meminimalisir

kemungkinan terjadinya kecurangan (Widiyarta, 2018). Tetapi apabila budaya organisasi tersebut buruk maka tingkat terjadinya kecurangan akan semakin banyak.

Pada dasarnya kecurangan / *fraud* disebabkan oleh tiga hal yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga penyebab ini disebut dengan segitiga kecurangan / *fraud*. Dorongan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena sifatnya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan itu sendiri, misalnya dorongan karena kesulitan ekonomi. Di sisi lain, perusahaan dapat mengendalikan peluang dan rasionalisasi secara langsung, tanpa adanya peluang, meskipun terdapat dorongan dan rasionalisasi, maka kecurangan tidak dapat terjadi. Peluang dapat dikendalikan menggunakan sistem pengendalian internal dan juga *whistleblowing system* dan rasionalisasi dapat dikendalikan menggunakan budaya organisasi (Cressey, 1953). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Maka penulis tertarik melakukan penelitian pada kantor Bapenda Kota Pekanbaru untuk menguji “Determinan Pencegahan Kecurangan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”.

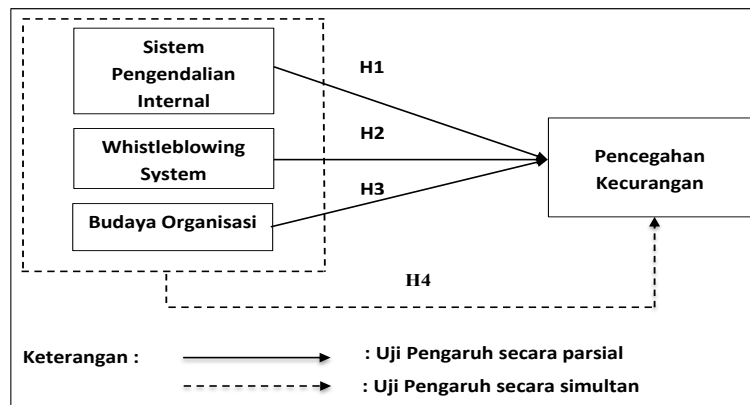
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan guna untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan evaluasi pencegahan kecurangan dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak kecurangan terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah seluruh pegawai yang bekerja di Bapenda Kota Pekanbaru yaitu 128 orang. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja diatas 5 tahun yang berjumlah 116 orang.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1:
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah :

- 1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan
- 2) Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan Kecurangan
- 3) Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan
- 4) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel dalam penelitiannya dan digunakan mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 2.6. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1:
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.225	1.496	
Sistem Pengendalian Internal	.160	.033	.354
<i>Whistleblowing System</i>	.061	.021	.214
Budaya Organisasi	.208	.031	.455

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,225 + 0,160X_1 + 0,061X_2 + 0,208X_3 + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,225 memiliki arti jika variabel independen diasumsikan nol (0) maka variabel pencegahan kecurangan yang merupakan variabel dependen memiliki nilai sebesar 0,225.
2. Nilai koefisien untuk variabel sistem pengendalian internal (X_1) adalah

sebesar 0,160. hal ini berarti setiap peningkatan variabel sistem pengendalian internal (X_1) sebesar 1 satuan maka terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar 0,160 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien untuk variabel *whistleblowing system* (X_2) adalah

sebesar 0,061 hal ini berarti setiap peningkatan variabel *whistleblowing system* (X_2) sebesar 1 satuan maka akan terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar 0,061 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. Nilai koefisien untuk variabel budaya organisasi (X_3) adalah sebesar 0,208 hal ini berarti setiap peningkatan variabel budaya organisasi (X_3) sebesar 1 satuan maka akan terjadi penurunan variabel pencegahan kecurangan (Y) sebesar

0,208 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Dimana besarnya atau kecilnya pengaruh akan ditunjukkan dalam bentuk persentase. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2:
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.553	.540	1.475

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System

b. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam tabel *Adjusted R Square* sebesar 0,540 atau 54,00%. Artinya 54,00% pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi. dan sisanya 46,00 %, pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (F)

Uji simultan (f) dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Dimana jika nilai sig < 0,05, maka H_a diterima dan H_o ditolak, maka terdapat pengaruh simultan, dan jika nilai sig > 0,05, maka H_o diterima dan H_a ditolak, maka tidak ada pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel y. Hasil pengujian Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3:
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	280.271	3	93.424	42.916	.000 ^b
	Residual	226.395	104	2.177		
	Total	506.667	107			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa model regresi untuk seluruh variabel independen dapat berpengaruh secara simultan atau bersama sama terhadap variabel dependen dikarenakan pada tabel tingkat signifikan yang dihasilkan adalah $0,000 < 0,05$, dimana H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi

berpengaruh simultan terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Uji Parsial (T)

Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bersifat menentukan (*significance*)

atau tidak, dengan kriteria berdasarkan nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika nilai

signifikannya $> 0,05$ maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4:
Hasil Uji Parsial (T)

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.225	1.496		.150	.881		
	Sistem Pengendalian Internal	.160	.033	.354	4.921	.000	.832	1.202
	Whistleblowing System	.061	.021	.214	2.915	.004	.797	1.254
	Budaya Organisasi	.208	.031	.455	6.653	.000	.917	1.090

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

1) Hipotesis Pertama

Dari tabel 4 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $4,921 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

2) Hipotesis Kedua

Dari tabel 4 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $2,915 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,004$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

3) Hipotesis Ketiga

Dari tabel 4 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $6,653 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) pada tabel 4 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $4,921 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Karena sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor pencegahan kecurangan dimana dengan lingkungan pengendalian yang baik, penilaian resiko, informasi dan komunikasi yang baik serta pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana maka akan tercipta sistem pengendalian internal dan pengawasan yang baik sehingga akan mencegah atau meminimalisir tindak kecurangan itu terjadi.

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) pada tabel 4 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $2,915 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,004$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Karena, *whistleblowing system* merupakan salah satu faktor pencegahan

kecurangan dimana dengan seseorang melaporkan kecurangan yang terjadi tanpa adanya rasa takut untuk melaporkan kecurangan serta di instansi pemerintahan memiliki media komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran maka akan tercipta *whistleblowing system* yang baik di suatu instansi tersebut dan ini akan mencegah atau meminimalisir para pelaku kecurangan enggan untuk melakukan tindak kecurangan tersebut.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) pada tabel 4 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $6,653 > 1,660$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Karena, budaya organisasi merupakan salah satu faktor pencegahan kecurangan dimana dengan pengarahan, dukungan pemimpin, kontrol, sistem imbalan, pola komunikasi, integritas, komitmen, dan juga ketulusan dari setiap individu akan menciptakan budaya organisasi yang baik didalam suatu instansi pemerintah sehingga dengan budaya organisasi yang baik ini akan dapat mencegah atau meminimalisir tindak kecurangan itu terjadi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi. Setelah dilakukannya uji hipotesis menggunakan uji f H4 diterima karena tingkat signifikan yang dihasilkan adalah $0,000$ dimana lebih kecil dari $0,05$. Dengan hasil H4 diterima maka dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi secara simultan atau bersama sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Jika dilihat di lapangan dan hasil kuesioner yang telah disebarkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwasannya seluruh variabel sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi memiliki

keterikatan yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Dimana jika salah satunya tidak ada atau memiliki tingkat yang rendah juga dapat menimbulkan kecurangan. Misalnya ketika pengawasan manajemen dari dalam atau internal organisasi, perusahaan ataupun suatu instansi itu baik maka sistem pengendalian internalnya juga akan baik dan bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak kecurangan, tetapi walaupun sistem pengendalian internalnya baik sedangkan *whistleblowing system* dan budaya organisasinya rendah maka akan dapat terjadi juga tindak kecurangan tersebut. hal ini dikarenakan mereka para pelaku kecurangan tidak menyadari bahwa melakukan kecurangan merupakan suatu perilaku yang dilarang atau tercela serta melanggar norma norma dan harus dihindari / di jauhi. Maka dari itu ketika ketiga variabel ini disatukan maka dapat berpengaruh secara bersama sama terhadap pencegahan kecurangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dan sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta budaya organisasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Kesadaran peneliti bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi : Penelitian ini hanya mengambil sampel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru., variabel yang diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan hanya terbatas pada sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi saja, dan penelitian ini tidak menambahkan teknik wawancara, sehingga peneliti tidak bisa

memperoleh informasi secara langsung dari responden.

Oleh karena itu peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel dengan memperluas area penelitian seperti di instansi-instansi pemerintah lainnya, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang lebih nyata. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel yang lain seperti perilaku etis, *good corporate governance*, dan lain sebagainya guna mengetahui kemungkinan faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan. Dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah teknik wawancara agar hasil yang didapatkan lebih akurat karena memperoleh secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, N. M. M., W, R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Sekecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 798–824.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahanl Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586-618.
- <https://amanahnews.com/read/detail/65090>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukulilo, Desa Blayu Dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* , 8(1), 1 – 13, e-ISSN : 2715-7016.
- Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292-303.
- Nugroho, V.O. 2015. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Perilaku Etis sebagai Variabel Intervening pada PT. Pagilaran. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. (2020). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud : The indonesian experience. *International Journal of Environmental Science*, 5, 151–158, ISSN: 2367-8941.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing system Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa - Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* , 4(3), 227–237, e-ISSN: 2685-5607.
- Sigiro, L. H. (2019). PENGARUH PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DAIRI.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Moralit y, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*,30(11),2780–2794.

- Wardana, I Gede Adi Kusuma. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng). Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 8(2), 1–12.

